

BAB III

RELASI ISLAM DAN NEGARA

A. Soekarno dan Islam

Ditinjau dari segi ideologis, Soekarno sering dianggap sebagai seorang singkritis, karena dirinya merupakan personifikasi dari empat aliran ideologi : Tradisionalisme, Jawa, Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Sedangkan bila ditilik dalam segi keagamaan menurut Clifford Greetz, ia menganut agama yang memiliki gaya keagamaan sendiri, gaya Soekarno.⁵⁷

Agama dan keberagaman orang tua banyak mempengaruhi agama dan keberagaman anaknya. Demikian halnya dengan Soekarno. Ayahnya seorang priyayi Jawa yang secara formal mengaku sebagai penganut agama Islam, tetapi sebenarnya ia adalah seorang penganut thosofi Jawa. Sedangkan ibunya berasal dari keturunan Brahmana Bali, penganut agama Hindu Bali. Baik ayahnya maupun ibunya sering menasehatinya dengan nasihat-nasihat yang bersifat religius, sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut. Ayahnya sering berkata, “Jangan lupa kepada Gusti Yang Maha Suci” sedangkan ibunya berpesan “jangan lupa Karno kepada Hyang Widi”⁵⁸

Theosofi Jawa dianut oleh ayahnya, Raden Soekemi, dalam konteks agama Jawa oleh Clifford Greetz dapat dimaksudkan dalam kategories “Varian Abangan”⁵⁹ yang merupakan hasil dari proses Islamisasi masyarakat Jawa yang belum sepenuhnya berhasil hingga kini pada sebagian masyarakat Jawa walaupun mengaku

⁵⁷ Baca Clifford Greetz, Islam yang saya amati, *Perkembangan di Maroko dan Indonesia*, (Jakarta: YIIS, 1982).

⁵⁸ Badri Yatim, Soekarno, *Islam.....*, 48.

⁵⁹ Lihat Clifford Greetz, *Santri Abangan dan Priyayi*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), 80.

sebagai penganut agama Islam, namun pengaruh agama Hindu- Bunda tetap bertahan. Dalam beragama, mereka mudah sekali menyesuaikan diri, bersifat tentative, sinkretif dan yang paling penting beraneka ragam dan kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan tidak seragam.⁶⁰ Sebagai keturunan bangsawan priyayi, tentu Soekarno banyak memiliki persamaan dengan kaum priyayi. Akibat oroses Islamisasi, kaum priyayi melepaskan ritualisme Hindu, akan tetapi masih tetap menganut panteisme Hindu lengkap dengan praktek-praktek metafisisnya. Hasil yang lebih lanjut adalah Islam yang tidak berpretensi memiliki semangat berkobar-kobar, melainkan memiliki semangat tolrens. Ia bersifat Fabian (menghendaki perubahan yang berangsur-angsur).⁶¹ Karena itu proses Islamisasi di Jawa dianggap belum selesai. Demikianlah halnya dengan R. Soekemi (ayah Soekarno) yang mengakui sebagai penganut Islam, tetapi masih mempraktekkan ajaran atau keyakinan agama Hindu dan agama asli jawa yang hingga kini masih mampu bertahan, yang oelh karena itu dalam kategori yang dibuat Clifford Geertz, ia dapat digolongkan sebagai "Varlan Abangan"

Disamping ibu dan ayahnya, Soekarno juga mendapat didikan agama dari Pak Suro. Ketika usia Soekarno 13 tahun, Pak Suro acapkali menanamkan ajaran ketuhanan dalam dirinya. Seperti yang diceritakan Soekarno sendiri :

Gusti Allah berkehandak menggelarkan didalam dunia ini. Bagaimana cara? Caranya ialah membuat semacam dapur. Dan yang dijadikan dadur buatau Gusti Allah untuk menggelarkan engkau ke dunia ini. Dua ini, ketiga Pak Suro

⁶⁰ Clifford Greetz, *Islam yang saya amati*....17.

⁶¹ *Ibid*.....22.

berkata engkau digelarkan oleh Tuhan dengan melewati dapur bapak ibumu....digelarkan di dunia ini.⁶²

Kurang jelas apakah Pak Suro ini tergolong “Varian Abangan” atau “Varian Santri” dalam kategorisasi Geertz. Tetapi yang pasti adalah bahwa pendidikan agama yang diterima Soekarno pada masa mudanya budaya dalam bentuk seperti diatas. Bentuk pendidikan agama seperti itu sering diulang-ulangnya dalam tulisan maupun pidato-pidatonya dalam rangka menanamkan pengetahuan agama dalam jiwa pemuda Indonesia. Lebih dari itu, kurang didapat data yang menyebutkan, apakah Soekarno pernah mendapat pendidikan agama yang lebih intensif apa usia mudanya yang bersifat ortodoks.

Tatkala tinggal di Surabaya, dirumah Tjokroaminoto, Soekarno mulai berkenalan dengan ajaran-ajaran Islam. Tjokroaminoto adalah seorang tokoh bukan seorang faqih.⁶³

Kehidupannya lebih banyak dicurahkan untuk kegiatan politik memimpin SI, dari pada mengkaji ajaran-ajaran Islam secara professional sebagaimana dilakukan oleh seorang ulama atau faqih. Dengan demikian, penguasaan Tjokroaminoto tentang ajaran Islam lebih banyak berkaitan dengan praktik politiknya (aspek muamalah), dari pada aspek-aspek islam dalam arti seperti ajaran-ajaran tentang akidah, syariah, atau fiqh. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam yang dipelajari Soekarno dari Tjokroaminoto adalah cenderung lebih berkaitan dengan aspek praktek politik ajaran-ajaran itu dari pada ajaran-ajaran dasar Islam itu sendiri. Disisi lain, Tjokroaminoto jauh lebih berperan membentuk kasadaran politik Soekarno dari pada

⁶² Salichin Salam, *Bung Karno.....*, 220.

⁶³ Faqih berarti ahli ilmu fiqh.

kesadaran keagamaannya.⁶⁴ Apa daya Tarik Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) bagi Soekarno ? pembaharuan modernisasi pemikiran Islam Soekarno sangat dipengaruhi Ahmad Dahlan.

Di Bandung, saat belajar di THS, Soekarno berkenalan dengan tokoh Persis (Persatuan Islam), Ahmad Hasan. Lewat pertemuan-pertemuan sering terjadi percakapan-percakapan antara keduanya tentang Islam. Dari percakapan itu ada kesan bahwa Soekarno tadinya tidak banyak mengerti masalah-masalah agama Islam.⁶⁵ Di kala tahun 1929 Soekarno dipenjara di Sukamiskin (Bandung), Ahmad Hasan dan anggota-anggota Persis lainnya sering mengunjungi Soekarno untuk memberikan banyak buku serta brosur tentang Islam kepadanya.⁶⁶

Banyak kyai dan ulana yang hanya memiliki pengetahuan relative terbatas. Misalnya dalam menafsirkan Al-Qur'an yang cenderung didasarkan pada Ilmu Nahwu dan Sharaf (Gramatik Arab). Tafsir ilmi, memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dengan memakai ilmu alam, seperti Biologi, Astronomi, sejarah dan arkeologi. Sebagaimana dikehendaki Soekarno masih tergolong langka, atau bahkan aneh. Ia juga menentang yang tidak mengerti taklidisme terhadap hadist-hadist shoeh Bukhari an Muslim sebagai dasar hokum Islam.⁶⁷ Dalam salah satu suratnya ia menyatakan :

Saya ingin sekali membaca lain-lain buah pen asaudara. Dan ingin pula membaca "Bukhari" dan "Muslim" yang sudah tersalin dalam bahasa Indonesia atau Inggris? Saya perlu kepada Bukhari atau Muslim itu, karena disitulah dihimpun hadist-hadist

⁶⁴ Sejauh yang diketahui, data-data yang ada cenderung menunjukkan kenyataan ini. Soekarno lebih dipengaruhi dan terpesona oleh gaya kepemimpinan Tjokroaminoto dari pada yang diketahui gurunya itu tentang Islam. Lihat Pengakuan Soekarno dalam Cindy Adams, Bung Karno....., 52.

⁶⁵ Badri Yatim, Soekarno, *Islam*....55.

⁶⁶ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara*....., 26.

⁶⁷ Ibid....., 26-27.

yang dinamakan shahih. Padahal saya membaca keterangan dari salah seorang pengenal Islam bangsa Inggris, bahwa di Bukhari pun masih terselip hadist-hadist yang lemah. Dia pun menerangkan bahwa kemunduran Islam, kekunoan Islam, kemesuman Islam, ketakhayulan orang Islam, banyaklah karena hadist-hadist lemah itu, yang sering lebih laku dari ayat-ayat AL-Qur'an...⁶⁸

Tahun 1930-an disaat Soekarno mendalami Islam merupakan suatu masa bagi kaum terpelajar Indonesia umumnya sedikit sekali yang memperhatikan agama Islam, agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Malahan mereka, terutama yang terdidik barat, seringkali menganggap rendah Islam. Ironisnya, perspektif negative kaum terdidik barat terhadap Islam itu didasarkan pada sikap masa bodoh, apriori, phobia, kebodohan dan kebencian. Tidak didasarkan atas kejian mendalam terhadap Islam sebagaimana dilakukan sebagian kaum orientasi. Sering kritik tajam atau pelecehan kaum orientasi terhadap Islam, dibangun diatas bangunan srgumentasi 'Iluna, dan fakta-fakta sejarah yang kokoh. Dari segi ini kaum orientasi lebih bermoral dibandingkan dengan kaum nasionalis sekuler ketika itu Soekarno menunjukkan kecenderungan sebaliknya, sekalipun ia belum meyakini keseluruhan ajaran secara integral, paling tidak telah berhasil membuktikan niatnya yang besar untuk melakukan kajian Islam adalah, munculnya tulisan-tulisan Soekarno tentang Islamdimasa pengasingan oleh kesewenangan kekuasaan Belanda. Tulisan-tulisan Soekarno masa pengasingan inilah yang kelak menjadi polemic dengan tokoh-tokoh reformis Islam seperti Haji Agus Salim, Ahmad Hassan dan Muhammad Natsir.

B. Sekulalirme : Agama Sebagai Urusan Pribadi

⁶⁸ Soekarno, Di bawah Bendera Revolusi, (Jakarta: Panitia di bawah Bendera Revolusi, 1964), 326.

Satu dasa warsa 1920-1930, menurut Taufik Abdullah merupakan “Dasawarsa Ideologi” dalam sejarah modern akan Indonesia. Di masa ini pulalah berbagai jenis ideology, yang kemudian akan berpengaruh dalam pertumbuhan keagamaan dan dasar ideology perjuangan, mulai diperdebatkan dikalangan kaum pergerakan nasional.⁶⁹

Faktanya ideology Islam mengakibatkan : pertama, makin diperjelas struktur intern panji-panji Islam, sehingga perbedaan yang kemudian bersifat “Aliran” ini bertambah rumit karena adanya pengaruh ide yang bersumber dari barat, seperti Maxisme dan Nasionalisme sekuler.⁷⁰ Kedua, dalam keyataannya ideologisasi memperkokoh ikatan solidaritas,⁷¹ baik secara politis, cultural maupun keagamaan. Dalam proses ini, ideology sebagai “seperangkat kepercayaan-kepercayaan yang berlembaga” berfungsi mempersatukan gagasan-gagasan, tingkah laku, dan karakter individu serta menuntut, suatu kekuatan pengikat dari para penganut ideology tersebut. Ideologisasi ini, semakin memperjelas identifikasi diri (self) dan integrasi kelompok makakah terjadi pertarungan dalam struktur sosial.⁷²

Dalam kondisi demikian, berkembang ideology secular, serta meningkatnya peranan partai dan tokoh sekkularis dalam melakukan akgrefaso dan artikulasi politik secara mudah akan menggugah kepekaan keagamaan dan idelogi dikalangan ummat Islam. Kenyataan ini dapat dipahami mengingat sebagian tokoh muslim pada saat itu seperti Tjokroaminoto, Agus Slaim, Ahmad Hassa, dan Muhammad Natsir, adalah

⁶⁹ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pemantauan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 15.

⁷⁰ *Ibid...*, 30.

⁷¹ *Ibid...*, 30.

⁷² Lihat Lewis Coser, dalam Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1986), 196.

ideology modernis universalis dan idealis. Mereka bukan saja menyakini akan keabadian ajaran Islam, tetapi juga keberlakuannya yang total, asal saja manusia dibimbing oleh iman dan menumbuhkan fitrahnya sebagai makhluk Allah.⁷³

Dalam menghadapi kekuasaan colonial serta zending Kristen, sikap kalangan Muslim tersebut tegas, tidak kompromi. Pemerintah colonial dalam pandangan mereka; seperti yang dikemukakan C Snouck Hurgronje adalah sebuah pemerintahan orang kafir yang pada hakikatnya tidak di mata Islam,⁷⁴ oleh karena itu mereka harus diusir dari tanah air Indonesia, sekalipun dengan cara kekerasan. Sedangkan terhadap gerakan misi dan zending Kristen, mereka menganggapnya dalam “lawan” Islam.⁷⁵ Berbeda dengan sikapnya terhadap pemerintah colonial dan misi Kristen, kalangan modernis muslim itu justru sering kali terjebak dalam sikap mendua menghadapi kalangan nasionalis sekuler, di mana Soekarno adalah Pionersny. Di satu pihak, kalangan modernis muslim(nasionalis Islam) harus melakukan kerja sama (aliansi) dan membentuk ikatan solidaritas politik dengan kalangan nasionalis secular dalam menghadapi pemerintah colonial Belanda. Di lain pihak antara golongan nasionalis Islami dan golongan nasionalis secular terdapat perbedaan ideology dasar perjuangan yang cukup tajam yang sering kali menciptakan konflik-konflik internal di kalangan kelompok nasionalis tersebut.

Kalangan nasionalis Islam menghendaki agar Islamlah yang dijadikan dasar ideology perjuangan menghadapi colonial, sedangkan nasionalis secular menghendaki dasar nasionalisme yang lepas dari Islam. Mereka yang menyebut kelompoknya

⁷³ Taufik Abdullah, *Islam dan....*30.

⁷⁴ Kutipan G.H Bousquet, “A French View of The Netherlands Indies,” dalam Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraani*, (Jakarta : LP3ES, 1985), 53.

⁷⁵ Natsir, “Zending Contra Islam,” dalam *Islam dan Kristen di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), 26-31

sebagai golongan “kebangsaan” nasionalis secular menuntut agar nasionalisme yang lepas dari faham agar maupun, yang harus dijadikan dasar ideology perjuangan mereka sebagaimana kalangan pragmatis pada umumnya menganggap agama pada dasarnya merupakan “urusan pribadi dan individual” karena itu agama sulit memberikan dasar yang kokoh untuk suatu ideology nasionalisme yang mampu mengakomodasi dan mengintegrasikan seluruh kelompok, agama dan ras yang beraneka ragam di Indonesia.

Soekarno yang notabene berdiri di kelompok nasionalis secular, sangat yakin bahwa pengideologisasian agama terhadap Negara menyalahi faham kebangsaan. Ia mendasarkan pandangan dengan teori kebangsaan Ernest Renan. Renan berpendapat bahwa pengalaman histories (sejarah) dan kehendak hidup bersamalah yang dapat dijadikan dasar ideology perjuangan bangsa. Dalam salah satu tulisannya yang dikutip Soekarno, Renan mengemukakan teori tentang pembentukan ideology bangsa Nation (Bangsa) menurutnya, adalah suatu nyawa, asas rohani, yang terbentuk dari suatu kondisi histories dan keinginan bersama untuk bersatu. Bukan dari hal-hal lain yang sifatnya parsial seperti persamaan ras, bahasa, agama atau letak geografis bangsa itu.⁷⁶

Selain itu faham kebangsaan Soekarno juga dibentuk oleh pemikiran-pemikiran Karl Kautsky, Karl Radek dan Otto Bauer. Bangsa menurutnya, yang merupakan kesimpulan dari pemikiran ketiga tokoh tersebut, adalah suatu persamaan perangai yang muncul dari suatu proses histories yang dialami oleh masyarakat.⁷⁷ Jadi bangsa dalam konsep Soekarno merupakan sebuah keterikatan emosional yang sifatnya rohani

⁷⁶ Lihat, Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, (Jakarta : Panitia Dibawah Bendera Revolusi, 1964) Jilid I, 3

⁷⁷ Lihat, *Ibd.....*, 3

dimana ia terbentuk lewat perjalanan histories yang panjang, dan membentuk sebuah keinginan untuk hidup bersama dalam nuansa solidaritas yang besar yang melampaui hal-hal yang sifatnya parsial. Oleh karenanya tidak cocok jika kemudian kesamaan ras, agama, ataupun letak geografis diletakkan sebagai landasan ideology bangsa.

Kerangka berfikir Soekarno yang demikianlah, yang kemudian menjadi roh penggerak bagi perjuangannya meraih kemerdekaan dari tangan penjajah. Kesombongan rasial, agama atau yang lainnya akan lebur dalam semangat kebangsaan universal yang melahirkan nasionalisme, digambarkan dengan rasa percaya diri untuk melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan.

Menurut Isbodroini Suyanto Nasionalisme adalah suatu konsep yang berpendapat bahwa kesetiaan individu diserahkan sepenuhnya kepada Negara.⁷⁸ Nasionalisme yang dikembangkan oleh Soekarno mencerminkan rasa anti kolonialisme dan imperialisme, untuk mewujudkan idenya, ia membuat kendaraan politik, PNI. Dilihat dari kerangka ideology, nasionalisme yang dikembangkan Soekarno adalah antitesa terhadap ideologisasi-ideologisasi puritan. Kelompok-kelompok agama (Islam) dan kelompok kiri, marxisme disisi lain saling bertolakan untuk menjadikan agama atau marxisme sebagai ideology bangsa.

Bagi bangsa Indonesia yang pada waktu itu masih dalam perjuangan meraih kemerdekaan dari penjajahan, kondisi demikian sangat tidak menguntungkan. Perjuangan-perjuangan kecil yang dilandasi sengant, puritan yang tidak merepresentasikan seluruh lapisan masyarakat yang pluranl ini, tidak akan ada artinya

⁷⁸ Isbodroini Suyanto, "Soekarno dan Nasionalisme, dalam Nazaruddin Sjamsuddin, ed, Soekarno : Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 37

tanpa adanya kesatuan visi akan kecintaan terhadap bangsa yang satu. Oleh karenanya nasionalisme yang dikembangkan Soekarno adalah ideology yang tepat untuk mensubordinasi ideology-ideologi lain yang sifatnya parsial.

Nasionalisme, Islamisme, dan marxisme adalah azas-azas yang dianut oleh pergerakan-pergerakan rakyat diseluruh Asia. Inilah faham-faham yang menjadi rohnya pergerakan-pergerakan di Asia itu. Rohnya pula pergerakan-pergerakan di Indonesia kita ini. Partai Boedi Oetomo, almarhum, National Indische Partij yang kini masih “hidup”. Partai Sarekat Islam, Persserikatan Minahasa, Partai Komunis Indonesia dan masih banyak partai-partai lain, itu masing-masing mempunyai roh nasionalisme, roh Islamisme atau roh Marxisme adanya. Dapatkah roh-roh ini dalam politik jajahan bekerja bersama-sama menjadi suatu roh yang besar, roh persatuan? Dapatkah dalam tanah jajahan pergerakan Nasionalisme itu dirapatkan dengan pergerakan Islamisme yang pada hakekatnya tiada bangsa, dengan pergerakan Marxisme yang bersifat perjuangan internasional?⁷⁹

Dari sinilah titik tolak pemikiran Soekarno tentang konsep pembentukan Negara. Kebangsaan, sebelum berkembang menjadi pemikiran sekuler dengan mengambil Turki dibawah pemerinath Kamal Attatruk sebagai inspirasinya.

Secara umumnya, ada tiga macam arus umum wacana (discourses) tentang hubungan agama dan Negara di Indonesia, yakni (1) Pemikiran yang menghendaki keterpisahan agama dari system kenegaraan; (2) Wacana yang bercorak integralistik; (3) Wacana yang melihat hubungan komplementer agama dan Negara.⁸⁰ Pada corak

⁷⁹ Soekarno, *Dibawah Bendera.....*, 3

⁸⁰ Muhammad Hari Zahhariri, *Agama dan Negara : Analisis Kritisi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*, (Jakarta : Murai Kencana, 2004), 74

pertama dan ketigalah wacana hubungan agama dan Negara yang dikembangkan Soekarno.

Dalam perjalanan, sejarah perjuangan Bangsa Indonesia melawan imperialisme, kita tidak bisa begitu saja mengabaikan peranan golongan agama (Islam). Perlawanan Cut Nyak Dien, Diponegoro, dan Sultan Demak misalnya : menggunakan simbol-simbol agama untuk mengorbarkan semangat perjuangan rakyat Indonesia waktu itu. Dan pada perkembangan selanjut ketika perjuangan rakyat tidak lagi bersifat kedaerahan tetapi telah melebar scubnya, menjadi perjuangan nasional, simbol-simbol agama tetap saja digunakan mengejawantan dalam Sarekat Dagang Islam (SDI), yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam (SI). Misalnya maka dari itu mustahil jika kemudian unsure agama ditiadakan dalam pembentukan Negara. Fakta kesejarahan yang demikian memunculkan wacana komplementas agama-negara yang oleh Soekarno di konsepsiakn dengan nasionalisme atau lebih ekstrim dengan wacana yang menjadi kontroversi diakhir hayatnya, yaitu Nasionalisme-Agama- Komunis (Nasakom).

Akan tetapi jika kita telusuri perjalanan sejarah pemikiran Soekarno, ia cenderung kepada wacana sekularisme yang menghendaki keterpisahan agama dan Negara. Ia mengambil Turki dan Negara-negara eropa di barat sebagai model idealnya. Yaitu bahwa agama dapat dan harus dipisahkan dari Negara dan pemerintahan, sebab agama merupakan aturan-aturan spiritual (akhirat) dan Negara adalah masalah duniawi (secular).

Dengan mengutip dan memformulasikan kembali kata-kata hadis Edib Hanoum,⁸¹ Soekarno mengemukakan pendapatnya :

“..... bahwa agama itu perlu dimerdekakan dari asuhannya (negara), supaya menjadi subur kalau Islam terancam bahaya pengaruhnya di atas rakyat Turki, maka itu bkanlah karena di urus pemerintahan (Sici) tetapi justru karena diurus pemerintahan. Umat Islam terikata kaki tanganya dengan rantai kepada politiknya pemerintahan. Hal ini adalah suatau halangan besar sekali buat kesuburan Islam di Turki dan bukan saja Turki, tetapi dimana-mana sahaja, karena pemerintah campur tangan did lam urusan agama, di situ menjadikan ia satu halangan besar yang tidak dapat dienyahkan.”⁸²

Soekarno juga mengutip ucapan Mahmud Bey, bahwa agama itu perlu dimerdekakan dari nagara, sebab manakala agama dipakai pemerintah, ia (agama) selalu dijadikan alat penghukum ditangan raja-raja, orang-orang zalim, dan tangan besi. Dengan demikian agama dapat menyelamatkan dunia dari bencana, hendaknya di zaman modern ini urusan dunia dipisahkan dari urusan spiritual sehingga agama menempati singgasana yang maha kuat dalam kalbunya kaum yang percaya.⁸³

Soekarno kemudian menguyip ucapan Kamal Attaturk.

“Saya memerdekakan Islam dari ikatan Negara, agar supaya Islam bukan hanya tinggal agama memutar tasbih di dalam masjid sahaja, tetapi menjadikan satu gerakan yang membawa kepada perjuangan.”⁸⁴

Tujuan Kemal dan para pendukungnya memisahkan agama dari Negara, menurut Soekarno bukan untuk mendurhakai Islam, tetapi justru agar Islam dapat lepas dari belenggu yang menghalangi kemajuannya.

⁸¹ Halide Edib Hanoum adalah seorang penulis produktif asal Turki. Di saat terjadinya peperangan antara Turki dan Inggris, ia dan suaminya berjuang bersama-sama dengan Mustofa Kemal Attaturk, tetapi setelah kemerdekaan Turki tercapai ia harus berimigrasi ke luar negeri disebabkan tekanan pemerintah Attaturk terhadapnya.

⁸² Soekarno, *Di bawah Bendera....*, 404.

⁸³ *Ibid....*, 404.

⁸⁴ *Ibid....*, 404.

“.... Maka kemerdekaan agama dari ikatan Negara itu berarti juga, kemerdekaan Negara dari ikatan-ikatan agama yang jumud, yakni kemerdekaan Negara dari hukum-hukum tradisi dan paham Islam kolot yang sebenarnya bertentangan dengan jiwanya Islam sejati, tetapi sellau menjadi rintangan nyata bagi gerak-geriknya Negara kearah kemajuan dan kemodernan. Islam dipisahkan dari Negara agar supaya Islam dapat menjadi merdeka dan Negara pun menjadi merdeka, agar supaya Islam berjalan sendiri agar supaya Islam dan negarapun subur pula.”⁸⁵

Ggasan pemisahan agama dari Negara menurut Soekarno tidak hanya terjadi di Turki, tetapi di Negara-negara Eropa seperti Belanda, Perancis, Jerman, Belgia, Inggris, serta negeri-negeri Kolonial yang beragama Islam seperti Indonesia.⁸⁶

Selanjutnya dikemukakan dasar pemikirannya tentang pemisahan agama darinegara dengan mengutip pendapat seorang ulama al-Azhar (Kairo) Syekh Ali Abdur Raziq yang dikutip Soekarno pada dasarnya berprinsip bahwa keharusan bersatunya agama dengan Negara tidak ada dasarnya dalam syari’at Islam (al-Qur’an dan al-Sunnah) maupun ijma’ ulama, sebab tugas Nabi Muhammad yang terpokok adalah menegakkan syi’ar Islam tanpa bermaksud mendirikan Negara, atau membentuk khilafah yang akan menjadi kepala masyarakat politik.

“ di dalam hal ini un ada satu aluran yang mengatakan bahwa agama-agama urusan negara. Misalnya di dalam tahun 1925 terbitlah di Kairo sebuah tulisan syeh Ali Abdurraziq “al-Islam wa ushul al hukm”, yang mencoba membuktikan bahwa pekerjaan Nabi dulu hanya mendirikan satu Negara, satu pemerintahan dunia, zonder pula memastikan adanya Negara, satu pemerintah utama buat urusan-urusan Negara.”⁸⁷

Dari sini terlihat pemisahan agama dari Negara dalam pandangan Soekarno dilandasi dengan pendekatan sejarah, dengan argumentasi : (1) Penyatuan itu bertentangan dengan prinsip demokrasi; (2) Hal itu dimungkinkan oleh watak hukum

⁸⁵ *Ibid.*...., 405.

⁸⁶ *Ibid.*...., 407.

⁸⁷ *Ibid.*...., 406.

Islam yang luntur; dan (3) Tidak ada consensus ahli agama tentang bersatunya agama dan politik. Dengan demikian pemisahan agama dari Negara ini menurut pikirannya Soekarno tidak dengan sendirinya ajaran Islam lantas di kesampingkan, sebab rakyat dapat memasukkan Islam ke dalam kebijaksanaan politik Negara. Melalui jalan politik, umat Islam dapat berjuang di parlemen, dan jika menguasai kursi parlemen dapat menentukan kebijakandan hokum-hukum Negara. Jika proses konstitusional ini dapat dilalui umat Islam. “Persatuan agama dan negara” adalah abash. Mengutip buku Badri Yatim Islamdan Nasionalisme. Pardugo melihat bahwa “kemenangan politik Islam secara konstitusional” inilah yang dimaksud pertautan agama dan Negara dalam pengertian yang sebenarnya. Sebab, Islam tidak menginginkan Cap resmi, seperti Negara Islam.⁸⁸

Soekarno menyakini demokrasi sebagai alternative bentuk agama, bila timbul masalah pemisahan agama dari Negara. Menurutnya, dalam Negara demokrasi ini, semua kelompok agama dituntut menguasai parlemen, sebab bila mereka menguasai lembaga itu secara otomatis menguasai Negara :

“lagi pula disuatu negeri yang ada demokrasi yang ada perwakilan, rakyat yang benar-benar mewakili rakyat negeri yang demikian itu, rakyatnya toh dapat memasukan segala macam “keagamaannya” kedalam tiap-tiap tindakan Negara, walaupun disitu agama dipisahkan dariagama. Asal sebagian besar anggota parlemen politiknya politik agama, maka semua keputusan-keputusan parlemen itu bersifat agama pula. Asal sebagian besar anggota-anggota parlemen itu politiknya politik Islam, maka tidak akan dapat berjalan satu usul jua pun yang tidak bersifat Islam.⁸⁹

“..... Maka negar itu dengan sendirinya bersifat Negara Islam, Zonder artikel didalam undang-undang dasar bahwa ia adalah nagara agama, Zonder dikatakan bahwa ia adalah Negara agama.⁹⁰

⁸⁸ Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, (Jakarta: Grafitipers, 1993), 182.

⁸⁹ Soekarno, *Di bawah Bendera.....*, 407.

⁹⁰ *Ibid.....*, 452

Deliar Noer menganggap konsepsi Soekarno ini telah mengurangi sejarah panjang polemic tentang hubungan agama-agama sejak 1919, ketika ALimin Prawirodirdjo mengajar faksinya di Serekat Islam untuk tidak mencapuradukkan agama dari Negara hingga masa Soekarno tahun 1940-an, yang banyak ditulis di majalah *Pandji Islam*.⁹¹ Deliar Noer juga mendapati fakta bahwa menurut Soekarno (1940), rakyat dapat memasukkan ajaran-ajaran Islam itu kedalam sikap dan kebijaksanaan Negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁹²

Pandangan sukuler Soekarno yang mengedepankan pemisahan agama dengan Negara, karena agama adalah urusan pribadi, menurut Dekar Noer, bersifat tidak mendasar. Hanya akibat adu argument dengan “golongan” Islam yang sebenarnya, adalah pandangan “lunak” yaitu pandangan komplementer Islam dengan Negara Deliar Noer menulis :

“Tetapi seperti juga dikemukakan diatas Soekarno berpendapat bahwa ini bukan berarti penghapusan aturan-aturan Islam. Karena peraturan itu bisa dimasukkan ke dalam undang-undang dan peraturan dari Negara, asal sebagian tersebut dari wakil-wakil rakyat didalam badan perwakilan itu (terdiri dari) wakil-wakil Islam. Negara demikian yang formalnya memisahkan agama. Karena cita-cita Islam (ialah) bahwa state haruslah bersatu dengan agama, tetapi bukan secara formal.”⁹³

Pendapat Deliar Noer yang menganggap Soekarno “Lunak” ini, memang tidak terlepas dari Soekarno sebagai seorang muslim. Ia berkeinginan pula untuk membela Islam. Ia ingin melakukan hal itu melalui perjuangan dalam parlemen, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Oleh karenanya terkesan bahwa Soekarno memiliki pandangan yang bingung terhadap hubungan agama dan Negara. Disisi lain ia ingin nilai Islam masuk ke dalam

⁹¹ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), 189-195.

⁹² *Ibid.*....., 198.

⁹³ *Ibid.*....., 196.

peraturan Negara, tetapi ia juga tidak ingin Negara menjadi Negara agama. Nilai Islam tidak serta bisa diintegrasikan dalam Negara, kecuali, menurut Soekarno, Negara itu menjalankan proses demokrasi yang adil. Dan agar supaya nilai Islam berintegrasi dengan Negara, umat Islam harus bekerja keras dalam proses demokrasi itu agar kursi parlemen sebagian besar bisa diduduki orang Islam.

Soekarno memperingatkan agar dalam Negara demokrasi tidak mencantumkan pernyataan bahwa “Negara ialah Negara agama” di dalam undang-undang dasarnya, sebab rencana Undang-undang dasar yang demikian itu menyatukan Negara dan agama Islam, tidak akan diterima oleh badan-badan perwakilan itu. Wakil-wakil pihak yang bukan Islam akan menentanginya mati-matian, wakil-wakil yang lain pun meskipun mereka beragama “Islam” (yang sebagian besar intelektual), tidak semua menyetujuinya pula.⁹⁴ Selanjutnya ia menulis:

Maka realitas itu menunjukkan kepada kita bahwa azas persatuan Negara dan agama itu bagi Negara yang penduduknya tidak bulat 100% semua Islam tidak bisa berbarengan dengan demokrasi. Buat negeri yang demikian itu hanyalah dua alternative, hanya dua hal yang boleh satu di antaranya: Persatuan Negara-agama, zonder demokrasi, atau demokrasi, tetapi Negara dipisahkan dari agama. Persatuan Negara-agama, tetapi mendurhakai demokrasi dan main dictator atau setiap kepada demokrasi tetapi melepaskan azas persatuan Negara dan agama.⁹⁵

Sistem pemerintahan “Negara-negara” menurut Soekarno merupakan system pemerintahan Caesaro-papisme. Dalam kasus Turki, sistem pemerintahan ini dijalankan oleh ulama di bawah pimpinan sheikhul Islam, yang pada akhirnya melahirkan dualisme yang menghambat dan melemahkan Negara Turki selama berabad-abad. Soekarno menulis:

⁹⁴ Soekarno, *Di bawah Bendera.....*, 452.

⁹⁵ *Ibid.....*, 452.

“...maka ternyata bahwa system dualisme di dalam pemerintahan itu adalah selalu menjadi rem dan penghambat tiap-tiap tindakan Negara Caesaro-papisme hanyalah dapat membesarkan negeri, manakala Kaisar Paus atau Sultan, Sultan Khalifah itu satu tokoh yang kuat dan mutlak. Caesaro-papisme hanyalah dapat menguatkan Negara, kalau kaisar paus dan sultan seperti de groot, seperti Salim I atau Muhammad II, seperti Ibnu Saud seperti Nebukadnezar, yang zonder banyak omong lagi dia sendiri menerapkan tiap-tiap tindakan Negara Caesaro-papisme yang demikian ini sebenarnya tak ubahnya dengan pemerintahan tiap-tiap dictator Hitler-Caisaro papisme yang demikian itu menjadi satu hal kepribadian, satu hal person lijke figuur, satu hal kekuatannya dan kebesiannya seorang yang menjadi kaisar-paus atau sultan khalif itu...”⁹⁶

Mengintegrasikan agama ke dalam Negara dengan cara Caesaro Papisme dalam artian pemerintahan di jalankan dengan kediktatoran seorang pemimpin, dan kekuasaan yang absolute, tampaknya Soekarno tidak menukainya, karena hal tersebut bertentangan dengan “Islam yang sejati” Islam sejati adalah satu religiuse demotratie, satu kerakyatan yang bersandar kepada persatuan agama. Islam sejati mencantumkan kepada soal khalifah itu beberapa syarat, yang dua di antaranya maha penting, maka riil : khalifah harus dipilih oleh umat Islam dan khalifah harus berkuasa sungguh-sungguh buat menegakkan dan melindungi Islam di seluruh kalangan umat. Islam sejati dus hanyalah membenarkan khalifah yang dengan bahasa asing, efectif dan wereldlijk machthebbend. Islam sejati tidak bermaksud mengadakan khalifah yang hanya sebagai puasnya orang Kristen saja : semata-mata hanya kepala agama saja dan tidak lain. Khalifah bukan saja harus seorang-orang yang terpilih oleh umat, ia harus pula berkuasa dunia seperti raja, seperti jendral, seperti kapala Negara.⁹⁷

Khalifah, menurut Soekarno, memang pada permulaannya dipilih tetapi pada perkembangan lanjut tidak lagi. Jabatan kekhalifahan telah diwariskan kepada keturunannya. Bahkan, kandangkala persatuan Negara diabaikan, lantaran

⁹⁶ *Ibid.*..., 432.

⁹⁷ *Ibid.*..., 436.

terdapatnya dua khalifah yang saling bersaing satu sama lain. Cara demokrasi diatas para penguasa agama merangkap sebagai penguasa Negara tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian pemisahan agama dan Negara seperti yang dilakukan Turki adalah model yang paling ideal.

Dari uraian-uraian diatas, jelas sekali Soekarno berpendapat tentang tidak perlunya perumusan formal dalam konstitusi yang menyatakan bahwa Negara bersatu dalam agama, atau Islam adalah agama resmi Negara. Perumusan formal konstitusi seperti itu akan mematikan inisiatif rakyat, tetapi juga mengakibatkan terjadinya pemaksaan kehendak. Sebab, penguasa politik merasa berkewajiban untuk secara formal dan langsung melakukan Islamisasi dikalangan warga negaranya. Penguasa politik menggunakan kekuasaan pemaksa tertingginya, (Supreme Coursive Power) untuk maksud tersebut. Bila hal itu terjadi, Negara telah mengabaikan prinsip musyawarah dan menjurus kearah system kenegaraan totaliter. Soekarno tidak menghendaki pemerintah Negara totaliter, karena system tersebut bertentangan dengan demokrasi dan Islam.

Gagasan-gagasan Soekarno akan pemisahan agama dan Negara mendapat reaksi yang cukup keras dari A. Muchlis dan M. Natsir yang pada waktu itu merupakan salah satu tokoh Persis Bandung. Menanggapi pendapat yang menginginkan pemisahan agama dan Negara dengan jelas M. Natsir menolak hal ini dengan alasan apapun. Setiap orang mempunyai ideologinya sendiri apakah dia seorang Kristen, fasis ataupun komunis, begitu pula halnya dengan orang Islam. Bagi orang Islam hidup diatas dunia ini adalah dengancita-cita handak menjadi seorang hamba Allah.

Artinya, mencapai kejayaan di dunia dan kemenangan di akhirat. Dunia dan akhirat ini, sekali-kali tidak mungkin dipisahkan oleh seorang Muslim dan ideologinya.⁹⁸

Hal senada diungkapkan Ahmad Suhelmi, yang membuat mempertanyakan, apakah mungkin kita dapat menganggap agama (dalam hal ini Islam) sebagai urusan pribadi dan dunia belaka? Menurut Suhelmi, gagasan pemisahan agama dari Negara, dengan titik tolak keyakinan bahwa agama hanyalah masalah pribadi dan dunia merupakan gagasan seorang penganut sekularisme. Polarisasi dua benruk kehidupan yang diyakini Soekarno tersebut, menempatkannya dalam posisi seorang sekularis.⁹⁹ Seorang sekularis menyakini pemisahan agama dari politik adalah mungkin. Hal ini dilakukan dengan cara mengurung agama dalam soal kerohanian pribadi dan tidak dimaksudkan untuk terlibat dalam persoalan-persoalan politik.¹⁰⁰

Islam adalah antitesis sekularisme. Watak pemikiran seorang muslim berbeda tajam dengan watak seorang sekularis. Sulit bagi seorang muslim untuk membedakan kehidupan akhirat, kehidupan spiritual dengan kehidupan temporal. Oleh karena kehidupan akhirat, kehidupan spiritual dengan kehidupan temporal. Oleh karena dua bentuk kehidupan itu merupakan dua sisi pada satu mata uang yang sama (two side of same coin). Keseluruhan dimensi pemikiran seorang muslim itu berpusat pada Tuhan (teosentrik). Bertumpu pada prinsip tauhid (prinsip keesaan Allah SWT).¹⁰¹

Gagasan Soekarno diatas mirip dengan keyakinan politik yang dianut orang Eropa dan Amerika. Bagi orang Eropa dan Amerika memasukkan agama sebagai

⁹⁸ M. Natsir, *Capita Selecta*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 436.

⁹⁹ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, (Jakarta: Teraju, 2002), 97.

¹⁰⁰ Sharon Siddiqui, : *Islam Kontemporer: Agama atau Ideologi dalam Pesantren*, (Jakarta: P3M), No. 3/Vol. IV, 1978, 22-23.

¹⁰¹ Ahmad Suhelmi, *Polemik....*, 98.

suatu kekuatan politik adalah suatu keganjilan, karena mereka terbiasa berfikir bahwa agama hanyalah berhubungan dengan kesalahan seseorang.¹⁰²

Polemic pandangan Soekarno tentang ideal Turki sebagai bentuk Negara, Soekarno memiliki argument sendiri :

Didalam bukunya, *Turkey Faces West*, “Maka Halide Edib Hanoum menuliskan sebagai berikut (kecuali apa yang sudah saya sifirkan) : “Geef de Keizer wat des Keizer is, en god wat god is”, berikanlah kepada Allah apa yang bagi Allah. Orang Turki telah mempersembahkan apa-apa yang diperuntukkan bagi raja atau bagi Negara. Tetapi Negara ini masih sahajamemegang apa-apa yang sebenarnya diperuntukan Allah.....di dalam perkara ini umat Islam tidak begitu beruntung dan tidak begitu merdeka seperti golongan-golongan Nasrani itu adalah badan-badan yang merdeka menentukan sendiri segala hal-hal yang mengenai iman dan mengenai agama, menurut keyakinan mereka sendiri-sendiri tapi umat Islam adalah terikat dengan rantai kepada politiknya pemerintah. Keadaan yang demikian ini adalah suatu halangan besar buat kesuburan Islam di Turki, dan selalu mengandung bahaya, bahwa agama dibuat perkakas-perkakas keperluan politik.....kalau pemerintah campur tangan di dalam bagian yang paling suci dari hak-hak manusia itu, maka hak itu akan membawa akibat-akibat yang amat berbahaya.¹⁰³

Dalam salah satu tulisannya, Soekarno mengakhirinya dengan penekanan yang jelas. Ia menegaskan sungguh-sungguh arti pentingnya persoalan yang dikemukakan dalam keseluruhan artikelnya, “Siapa yang tidak insyaf akan pentingnya soal ini, siapa tidak ada rasa sejarah setetes pun di dalam ia punya darah, dia tidak ada “Historisch Instinct” sebesar punya jiwa.....¹⁰⁴ Kemudian dengan bersemangat Soekarno, mengajak orang-rang “berisi” untuk berdebat tentang masalah ini. Akhirnya, tanpa memberikan penilaian akhir terhadap tindakan Kemal (juga sebuah apologi atas pemikirannya sendiri).

Soekarno menyatakan :

¹⁰² Montgomery Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, Terj. HF. Zarkasyi dan Ti, Syam, (Jakarta: Benneti Cipta, 1987), 1.

¹⁰³ Soekarno, *Di bawah Bendera.....*, 438

¹⁰⁴ *Ibid*,.....444

Benar atau salahnya ia (Kemal Attaturk : Pen) punya perbuatan hebat itu bagi Islam, itu sebenarnya bukan kitalah yang dapat menjadi hakim. Yang dapat menjadi hakim baginya, hanyalah sejarah kelak dikemudian hari sejarah inilah yang kelak yang memutuskan : Kemal durhaka atau Kemal maha bijaksana.¹⁰⁵

C. Mengapa Sekularisme sebagai Kemestian ?

Di atas telah diuraikan, bagaimana Soekarno dengan teguh mempertahankan pendapatnya tentang kemestian agama terpisah dengan Negara, terlepas dari kontroversi yang mengikuti pemikirannya. Tetapi, sejarah telah mencatat bahwa pemikiran Soekarno terbukti menstimulan pemikiran- pemikiran lain sesudahnya. Yang menarik dicermati adalah didasarkan atas apa sekulari yang dicetuskannya, atau ia hanya mencomot Turki begitu saja sebagai contoh ideal tanpa landasan berfikir yang jelas ?

Turki sebagai model ideal atas gagasan pemisahan agama dan Negara Soekarno adalah tepat demi menjelaskan pemikirannya pada saat itu. Ia tidak saja setuju atas pemisahan agama dan Negara tanpa adanya argumentasi.keterpisahan agama dari Negara ia landaskan atas alasan bahwa :

1. Tidak ada Ijma' Ulama

Untuk mempertahankan gagasan pemisahan agama dari Negara Soekarno menganggap bahwa di kalangan ulama Islam tidak terdapat Ijma' ulama tentang keharusan bersatunya agama dengan Negara. Pendapatnya ini disandarkan atas pemikiran politik Ali Abdur Roziq yang terdapat dalam bukunya, Al-Islam waushul Al Hukum.

Dalam bukunya itu, Rayiq memulai pendapatnya dengan menolak semua pendapat kaum Muslim dan Ulama Islam semenjak permulaan berkembang

¹⁰⁵ *Ibid*,.....445.

pemikiran politik Islam. Tegasnya, ia menolak pandangan yang menyatakan bahwa khalifah adalah kepemimpinan umum (umat) dalam masalah agama dan keduniaan, sebagai pengganti fungsi Nabi SAW.¹⁰⁶ Menurut Raziq, agama Car Risalah dan kekuasaan politik (AL-Mul) tidak mempunyai kesesuaian satu sama lain, sebab agama (Ar-Risalah) merupakan sejenis martabat lainnya.¹⁰⁷ Keduanya merupakan dua aspek yang berbeda. Ia sama sekali menyangkal pendapat para pemikir politik Islam, termasuk Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa dalam Islam terdapat persatuan agama dan politik.

Pandangan persatuan agama dan politik dalam Islam menurut Raziq tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan merupakan kekeliruan dalam memahami hakikat misi Nabi Muhammad SAW. Dengan jelas Al – Qur'an mengakui pendapat yang menyatakan bahwa Rosulullah tidak ada sangkut pautnya dengan kekuasaan politik.¹⁰⁸ Juga, sepanjang hayatnya Rosulullah tidak memberikan petunjuk apa pun untuk membentuk sesuatu yang bisa disebut “Negara Islam” (Islamic State) ataupun “Negara Arab” (Arab State). Syariat Islam yang dibawa Nabi menurut Raziq hanyalah merupakan aturan dan hukum yang berkaitan dengan masalah keagamaan, sehingga Islam memberikan aturan moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan.¹⁰⁹

Berdasarkan pandangan ini, Raziq berprinsip bahwa Islam yang dibawa Muhammad SAW. Tidaklah pernah dimaksudkan untuk membentuk dan

¹⁰⁶ Ahmad Tafsir, “Kata Pengantar”, dalam Ali Abdur Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Terj. (Bandung: Pustaka Salam, 1985), i-ii.

¹⁰⁷ *Ibid*,.....86.

¹⁰⁸ Ali Abdur Raziq, ‘Kekhalifahan dan Dasar-Dasar Kekuasaan dalam J. Donohue dan J.L. Esposito, (ed), *Islam dan Pembaruan, Ensiklopedi Masalah-Masalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), 46.

¹⁰⁹ *Ibid*,.....49.

mengatur tatanan politik. ia juga menuntut agar ada pemisahan yang jelas dan tegas antara agama (ar-risalah) dengan kekuasaan politik (al-mulk), sehingga Islam dapat dijadikan sebagai suatu dasar Negara modern dan demi kepentingan-kepentingan pelestarian Islam sebagai suatu kepercayaan universal.¹¹⁰

Pendapat Ali Abdur Razig demikian yang menjadi polemic di kalangan Islam, tampaknya menjadi landasan berfikir Soekarno tentang hubungan politik dan Islam. Ia menulis:

“Tuan-tuan barngkali menanya : tidaklah syari’at Islam telah mengatakan dengan nyata-nyata, bahwa agama itu mengatur Negara pula, jadi bahwa agama menurut syariat itu menjadi satu, dengan Negara ? Ach, di dalam hal inipun sebenarnya tidak ada ijma’ yang bulat di kalangan kaum ulama. Didalam hal inipun ada satu aliran, yang mengatakan, bahwa agama-agama, urusan Negara-urusan Negara. Misalnya di dalam tahun 1925 terbitlah di Kairo sebuah itab tulisannya Sheikh Abdurazak “Al Wa Usul Al Hukm”, yang mencoba membuktikan, bahwa pekerjaan Nabi dulu itu hanyalah mendirikan satu agama saja, zonder pula memastikan adanya satu khalifah atau satu kepala ummat buat urusan-urusan Negara. Sudah barang tentu sheik Abdarazik ini dipersalahkan orang,.....,tetapi ada deliknya Sheikh Abdarazik ini satu Tjontoh betapa juga didalam soal agama dan Negara tidak ada ijmak ulama.¹¹¹

2. Tidak Ada Konsep Agama Islam

Sebagaimana pendapat Ali Abdul Razig, Soekarno menyakini bahwa timbulnya Negara Islam tidak dimulai saat Rasulluallah atau pun sahabat hidup (Khaulafau Rasyidin). Masyarakat Madinah pun tidak pernah ia sebut sebagai pemerintahan atau Negara Islam, melainkan umat Islam. Keraguan Soekarno semakin bertambah karena ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang digunakan untuk mendukung konsep Negara Islam, seringkali hanya dipergunakan demi

¹¹⁰ Eij Rosenthal, *Islam in the Modern National state*, (Cambridge: University Press, 1965), 86.

¹¹¹ Soekarno, *Di bawah Bendera.....*, 406-407.

mempertahankan keberlangsungan kekuasaan dinasyi tertentu dalam sejarah Islam.¹¹²

Istilah daulah dalam artian Negara tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Hal ini dikemukakan Soekarno pada waktu emberikan ceramahnya tentang Negara nasional dan cita-cita Islam di Universitas Indonesia. Ia menyatakan bahwa istilah daulah yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak dapat diartikan sebagai Negara, tetapi kedaulatan (Souverignty). Ceramah Soekarno di Universitas Indonesia ini kemudian dikemukakannya kembali pada saat ia berkunjung ke AMuntai (Kalimatan Selatan) tahun 1953. dalam ceramahnya tersebut secara tegas ia menolak konsep Negara Islam dan mendukung konsep Negara nesional.¹¹³

Apabila Indonesia menjadi Negara Islam dan Islam diterima sebagai dasar Negara, akan terjadi perpecahan di kalangan rakyat Indonesia. Karena tidak seluruh rakyat Indonesia terdiri dari umat Islam. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang penduduknya bukan beragama Islam seperti Maluku, Bali, Flores, Timor, Kepulauan Kei, Sulawasi Utara serta Irian Barat. Hancur dan pecahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah tragedy paling menakutkan Soekarno. Segala daya upaya apapun, nampaknya akan dilakukan Soekarno, termasuk menolak konsep Negara Islam, demi persatuan dan kesatuan Indonesia.

Soekarno konsisten dengan pendiriannya ini. Beberapa tahun kemudian (1957-1959), dalam perdebatan mengenai dasar Negara Indonesia dalam dewan kostituante, Soekarno kembali menolak konsep Negara Islam, seperti Muhammad Natsir, Zainal Abidin, Osman Raliby, Hamka, dan Saifuddin Zuhri.

¹¹² Ahmad Suhelmi, *Polemik.....*, 100.

¹¹³ *Ibid.....*, 101.

Pendapat Ali Abdar Raziq yang dikutip Soekarno bahwa dalam ‘Islam tidak ditemukan konsep Negara Islam’,¹¹⁴ dikemudian hari diamini oleh pemikir-pemikir Islam lainnya. Para pemikir Islam ini mengembangkan konsep Soekarno dengan memberi argumentasi yang rasional dan teologis. Masykuri Abdillah, misalnya berpendapat bahwa dalam al-Qur’an istilah atau konsep tentang Negara. Hal ini bisa dimaklumi karena konsep Negara atau nation-state seperti yang terjadi sekarang ini baru muncul pada abad ke 16 yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli (1469-1527). Meskipun begitu, lanjut Masykuri, bukan berarti bahwa konsep Negara itu tidak ada sama sekali dalam Islam, karena secara substantive terdapat sejumlah ayat al-Qur’an dan hadits yang menunjukkan adanya pemerintahan dalam umat Islam di samping itu, terdapat banyak ayat yang menunjukkan kewajiban melaksanakan hukum Allah dalam kehidupan masyarakat dan Negara, meski tak ada satu ayatpun yang menunjukkan keharusan mendirikan Negara. Hal ini kemudian dipahami bahwa Negara atau pemerintah itu hanya sebagai sarana untuk menghidupkan nilai-nilai Islam.¹¹⁵

Didalam Al-Qur’an terdapat prinsip-prinsip itu atau nilai-nilai yang harus dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang ternyata juga merupakan prinsip universal yang juga didukung oleh Negara-negara yang beradab pada umumnya. Nilai-nilai itu adalah : Kejujuran, keadilan, persaudaraan, menghargai kemajemukan atau pluralisme, persamaan, permusyawaratan, mendahulukan, perdamaian dan control.¹¹⁶

¹¹⁴ Soekarno, *Di bawah Bendera.....*, 406-407.

¹¹⁵ Masykuri Abdillah, “Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya pada masa kini” dalam Komaruddin Hidayat (ed). *Islam Negara dan Civil Society*, (Jakarta: Paramadina, 2005), 73-74.

¹¹⁶ *Ibid.....*, 74.

Model Negara Kesatuan yang dipilih Soekarno, menurut Sholahuddin Wahid, merupakan jalan tengah antara pandangan sekulaer dan fundamentalistik,¹¹⁷ yang pada akhirnya diyakini oleh banyak kalangan sebagai bentuk Negara yang final dan paling ideal untuk Indonesia.

D. Soekarno dan Pancasila

Wacana tentang makna, penafsiran dan manipulasi Pancasila telah menjadi bagian dari panorama politik Indonesia selama lima puluh tahun. Ketika Indonesia sibuk dengan perdebatan politik pada tahun 1990-an mereka sering menyinggung wacana ideologis dan peristiwa-peristiwa politik yang sedang berlangsung itu, yaitu tentang hubungan Islam dan Negara, perang angkatan bersenjata dalam politik, dan bentuk demokrasi yang sesuai dengan Indonesia, bisa didapati dalam sejarah Indonesia sejak 1940-an.

Polemic tentang hubungan Islam dan Negara menempatkan Soekarno sebagai rival golongan Islam. Dan pada 1 Juni 1945 pada saat Soekarno menyampaikan pidatonya di depan Balai Penyelidik Persiapan Kemerdekaan, Moment itu dicatat sebagai lahirnya Pancasila. Merupakan kemenangan gagasan Soekarno tentang tidak adanya Negara Islam atas golongan Islam.

Pancasila ada lima asas yang direncanakan oleh Soekarno (Juni 1945) guna menghadapi tuntutan-tuntutan pembentukan Negara Islam dan untuk mempertemukan keragaman cultural di Republik Indonesia yang akan segera dilahirkan itu. Asas ini yang pada awalnya masih diperdebatkan telah dijadikan ideology nasional eksklusif oleh pemerintah Orde Baru yang didukung kepentingan-kepentingan sempitnya

¹¹⁷ Abdurrahman Wahid, *Islam, Negara dan Demokrasi*, (Jakarta: Erlangga, 1999), 45.

sendiri. Tetapi menurut Dr. Ramage bahwa Pancasila memiliki makna yang jauh bagi rakyat Indonesia. Ketimbang baru. Sekalipun Pancasila oleh sebagian kalangan tetap diyakini sebagai asas yang tepat digunakan untuk membentuk hubungan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana pernah disinggung diatas bahwa Islam mempunyai sejarah panjang dalam ikut serta dalam pembentukan bangsa sejak zaman colonial sampai pasca kemerdekaan. Pada zaman colonial Belanda umat Islam selalu dibatasi gerakannya. Tetapi Islam telah menjadi identitas masyarakat Indonesia, yang membedakannya dengan Belanda. Bahkan Islam sudah merupakan ikatan pemersatu masyarakat, bukan saja kalangan masyarakat Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat Asia Tenggara.¹¹⁸

Oleh karena itu sangat wajar bila para pemimpin Islam tampil sebagai pengganti para pemimpin politik kuno, terutama di daerah luar Jawa, karena di Jawa, pemimpin Islam harus bersaing ketat dengan kaum cendekiawan secular baru yang berpendidikan barat dalam memperebutkan tampuk kepemimpinan di politik. Hal ini menurut Badri Yatim karena, pertama, masyarakat Jawa dalam perspektif agama dibagi dua, santri dan abangan. Sementara golongan yang kedua ini banyak mendapat pendidikan barat, dan mulian tampil sebagai tokoh politik. Kedua, kebangkitan Islam-modern dan kebangkitan nasionalisme terjadi bersamaan. Sementara Islam mengintegrasikan kehidupan agama dan politik.¹¹⁹

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 memang ditandai dengan kebangkitan gerakan-gerakan nasional dinegeri-negeri jajahan, termasuk dinegeri-negeri Islam.

¹¹⁸ Lihat Taufik Abdullah, *Manusia dan Kebudayaan di Asia Tenggara* (Islam di Asia Tenggara), (Jakarta: LIPI, 1976).

¹¹⁹ Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, (Jakarta: Logos, 1999), 156.

Sedangkan di negeri-negeri Islam sendiri masa itu ditandai dengan pembaharuan Islam. Salah satunya (yang menginspirasi Soekarno) adalah Pan Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani. Gerakan ini bertujuan untuk memperkuat rasa persaudaraan Islam, membela Islam dan membawa Islam kepada kemajuan. Al-Afghani berusaha mewujudkan persatuan di kalangan umat Islam diseluruh dunia, dibawah seorang pemimpin, dengan usaha memperbaiki system politik dalam Islam.¹²⁰ Dan gerakan Pan Islamisme ini mendapat sambutan dari organisasi-organisasi Islam di Indonesia.

Dari Soekarno pada tahun 1926 melihat bahwa gerakan Islam yang dipelopori Al-Afghani ini merupakan gerakan internasionalisme, dan Islam pada dasarnya gerakan tanpa bangsa. Bahka ia setuju atas keikutsertaan umat Islam Indonesia dalam Mukhtar Alam Islami di Makkah. Tetapi melihat perkembangan politik di Indonesia saat itu, dimana konflik ideologis terjadi antara golongan Islam, nasionalis dan Marxis, Soekarno mencoba menyatukan langkah dengan menghimbau agar golongan Islam, Nasionalisme dan Marxis untuk bersatu padu untuk melawan kapitalisme barat. Disamping menyatukan langkah dengan menunjukkan lawan yang sebenarnya harus dihadapi, Soekarno juga mencari titik temu ideologinya.¹²¹

Kerugian Soekarno ini, lebih didorong oleh jiwa nasionalismenya dari pada ke-Islaman atau ajaran-ajaran Marxisme, karena dari konsepnya tersebut jelastujuan gerakan nasional yang lebih mendapat perhatian. Bahkan persatuan gerakan nasional, pada waktu itu merupakan ideology ketiga aliran tersebut dengan

¹²⁰ Lihat dalam Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejati Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

¹²¹ Soekarno, *Di bawah Bendera.....*, 1-24.

kesimpulan bahwa sesuai ajaran-ajaran dasarnya maka ketiga aliran itu dapat bersatu, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip masing-masing.¹²²

Soekarno tidak lelah memperjuangkan idealismenya itu, hingga suatu saat ia berhasil membentuk PPKI, suatu badan kerjasama partai-partai di Indonesia. Akan tetapi adanya PPKI tidak lantas menghentikan polemic antara golongan agama dan golongan nasionalis sekuler. Mereka tidak saja berpolemik tentang ideologisasi Negara, tetapi juga saling berebut kekuasaan, mereka saling menyudutkan satu sama lain.

Konflik-konflik itu terus berlangsung hingga proklamasi dan sesudahnya. Sebagai seorang nasionalis, Soekarno yang mencintai persatuan terus berusaha mencari jalan keluar. Untuk mempersatukan ketiga aliran tersebut (marxisme, nasionalisme dan Islam) ia merasa perlu mendalami pengetahuan tentang mereka, baik secara teoritis maupun realitas dalam kiprahnya di Indonesia. Sebagai seorang nasional yang terlebih dulu mengenal ajaran-ajaran marxis dan nasionalisme secara mendalam tentunya Soekarnopun memandang perlu untuk mengetahui ajaran Islam, bukan saja karena Islam adalah agama yang dianutnya, tetapi Islam di Indonesia merupakan suatu kekuatan politik yang sangat berpengaruh. Pengetahuan itu dapat memberikan sumbangan kepadanya untuk mencari jalan keluar.

Perdebatan pengaruh politik terutama antara Islam dan nasionalisme pada masa Jepang semakin ketat karena Jepang memang lebih mengakomodasi dua kekuatan ini dari pada kalangan pemimpin nasionalis seperti priyayi, meskipun Jepang tetap berhati-hati dalam memberikan kebebasan berpolitik kepada umat IslamIndonesia. Namun lambat laun tampak cita-cita kelompok nasionalis sekuler

¹²² *Ibid.*

mulai kelihatan semakin kuat dan cenderung mengalahkan cita-cita golongan Islam. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya maklumat gunseikan No. 23 tertanggal 29 April 1945 tentang pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Badan ini kemudian mengharapkan kepada masyarakat agar bersedia menyumbangkan buah pikiran tentang bentuk dan isis dari Indonesia yang akan merdeka, baik melalui anggota badan atau melalui media massa. Dari gagasan-gagasan dan usul-usul yang masuk ternyata suara yang menginginkan dipisahkannya Negara dari agama lebih banyak dari pada usul-usul yang menginginkan pembentukan Negara Islam atau berlakunya hukum Islam dalam Negara Indonesia merdeka. Walau demikian, hamper seluruhnya berpandangan bahwa kebebasan beragama perlu dipertahankan.

Didalam badan inilah Soekarno mencetuskan idenya yang sangat bersejarah itu, yang disebut dengan Pancasila. Ide tersebut merupakan perkembangan dari idenya terdahulu tentang persatuan tiga aliran besar. Nasionalisme, Islam dan Marxis. Idenya ini dicetuskan guna mengakhiri konflik yang berkepanjangan tentang perlu dan tidaknya ideologisasi Islam dalam Negara. Kalau dahulu ia hanya menginginkan suatu bentuk persatuan federatif dengan ikatan yang sangat longgar, maka kini ia menetapkan asas bersama, agar dengan asas itu seluruh kelompok yang terdapat dinegara Indonesia dapat bersatu dan dapat menerima asas tersebut, Soekarno mengatakan dalam pidatonya :

“Kita bersama-sama mencari persetujuan philosophische gronslag, mencari satu weltanschauung yang kita setujui. Saya katakana lagi setujui! Yang saudara Yamin setujui, yang KI Bagus setujui, yang Ki Hajar setujui, yang saudara Sanusi setujui, yang saudara Abi Kusno setujui, yang saudara Lien Keen Hian setujui, pendeknya kita mencari satu modus. Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang disini maupun saudara-saudara yang

bernama kaum Islam, semuanya telah mufakat.....kita hendak mendirikan satu Negara “semua buat semua” kita punya tujuan.¹²³

Asas Negara yang diinginkan itu adalah :

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme dan perikemanusiaan.
3. Mufakat atau demokrasi.
4. Kesejahteraan social
5. Ketuhanan

Walaupun ketuhanan merupakan dasar Negara, namun tampaknya ketuhanan yang dimaksudkan oleh Soekarno bukanlah Tuhan dalam konsep Islam. Ia hanya menganjurkan agar seluruh warga Indonesia berketuhanan, dan seluruh warga bebas menjalankan agamanya masing-masing, serta saling menghormati satu sama lain. Tiada egoisme agama dalam Negara Indonesia, dan dengan demikian Negara pada dasarnya dipisahkan dengan agama, sebagaimana halnya di Turki. Agama menjadi milik pribadi, sedangkan Negara milik semua. Ia mengatakan “Semua buat semua Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat golongan Indonesia, bukan Hadikusumo buat Indonesia.....tetapi Indonesia buat Indonesia.”¹²⁴

Pemisahan agama dan Negara adalah jelas sekali pada saat itu menjelaskan asas ketuhanan, asas mufakat atau demokrasi. Bahwa nilai Islam tetap bisa diakomodasikan dalam Negara asal demokrasi berjalan dengan fair, dengan cara menyuarakannya di parlemen.

“Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Apa-apa yang belum memuaskan kita bicarakan dalam permusyawaratan.

¹²³ Soekarno, *Lahirnya Pantjasila*, Departemen Penerangan RI, tt.

¹²⁴ *Ibid.*

Badan perwakilan inilah tempat kita mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin rakyat apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau kita memang rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan, diduduki utusan-utusan Islam. Dengan sendirinya hokum-hukum yang keluar dari badan perwakilan itu, hokum Islam pula.¹²⁵

Konsep Soekarno tentang Negara merdeka tersebut tidak langsung diterima oleh seluruh anggota badan penyelidik itu, karena justru setelah pidatonya dialog ideologis yang sebenarnya terjadi. Dalam badan ini kedua golongan langsung berhadapan muka, saling adu argumentasi dan mempertahankan pendapat masing-masing. Tetapi pada akhirnya penitia ini mencapai kompromi, yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Ini merupakan Mukaddimah pada konstitusi berdasarkan rumusan yang tampaknya dpata disetujui semua anggotanya. Baik yang sekuler maupun yang Islam. Dalam Piagam Jkarta ini dimasukkan prinsip-prinsip Pancasila yang diuraikannya pada tanggal 1 Juni, walaupun dengan rumusan yang sedikit berubah. Perbedaan yang penting adalah : pertama, urutan kelima dasar telah berubah Ketuhanan dalam konsep Soekarno dijadikan menjadi sila pertma, juga dikeluarkan dengan anak kalimat berikut : “Dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”

Anak kalimat tentang menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya lagi-lagi menjadi polemic. Golongan Nasionalis-Sekuler jelas tidak setuju dengan pencantuman Syari'at Islam. Tetapi akhirnya terjadi kompromi dengan mencoret syariat Islam dari Piagam Jakarta. Ini artinya gagasan-gagasan Soekarno telah

¹²⁵ *Ibid.*

diterima oleh founding fathers Indonesia, dan Pancasila adalah refleksi dari Soekarno.